

MATERI 7:

CATATAN SEJARAH LP.MA'ARIF NU

LP MA'ARIF NU DARI MASA KE MASA

oleh

KH. Z. ARIFIN JUNAIDI

(KETUA PENGURUS LP MA'ARIF NU PUSAT)

I. Pengantar

Dengan jumlah anggota mencapai 83 juta orang (menurut survai ISNU)¹ tak pelak lagi Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Salah satu tujuan dari didirikannya NU adalah untuk mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia di lingkungan NU. Karenanya Bagi NU, pendidikan menjadi pilar utama yang harus ditegakkan demi mewujudkan masyarakat yang mandiri. Gagasan dan gerakan pendidikan ini telah dimulai sejak perintisan pendirian NU di Indonesia. Dimulai dari gerakan ekonomi kerakyatan melalui Nadlatut Tujjar (1918), disusul dengan Tashwirul Afkar (1922) sebagai gerakan keilmuan dan kebudayaan, hingga Nahdlatul Wathan (1924) yang merupakan gerakan politik di bidang pendidikan, maka ditemukanlah tiga pilar penting bagi Nahdlatul Ulama yang berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 M/16 Rajab 1334 H, yaitu: (1) ekonomi kerakyatan; (2) pendidikan; dan (3) kebangsaan.

Untuk merealisasikan pilar-pilar tersebut NU secara aktif melakukan gerakan sosial-keagamaan untuk memberdayakan umat. Di sini dirasakan pentingnya membuat lini organisasi yang efektif dan mampu merepresentasikan cita-cita NU. Maka lahirlah lembaga-lembaga dan lajnah; Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif, Lembaga Dakwah, Lembaga Sosial Mabarro, Lembaga Pengembangan Pertanian, dan lain sebagainya. LP Ma'arif NU dibentuk untuk melakukan gerakan pemberdayaan umat di bidang pendidikan yang sejak semula menjadi perhatian para ulama pendiri (*the founding fathers*) NU.

LP Ma'arif NU merupakan aparat departementasi Nahdlatul Ulama (NU) yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan-kebijakan pendidikan Nahdlatul Ulama, yang ada di tingkat Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, dan Pengurus Majelis Wakil Cabang. Berdasarkan Hasil Muktamar NU ke-33 tahun 2015 di Jombang, kedudukan dan fungsi LP Ma'arif NU diatur dalam Anggaran Dasar (AD) NU BAB VI tentang Struktur dan Perangkat Organisasi Pasal 12 dan 13, serta ART BAB V Pasal 16 tentang Perangkat Organisasi. Pasal 17 ayat (1) BAB tersebut

¹ Sumber lain menyatakan jumlah anggota NU 70 juta orang (*Antara News* 2011), sedangkan *IndoBarometer*, menemukan dari sekitar 191,4 juta penduduk Indonesia yang Muslim (mengadopsi data sensus tahun 2000), sekitar 75 persen dari jumlah tersebut mengaku warga nahdliyin. Artinya jumlah warga NU sekitar 143 juta tahun 2000.

menggariskan, “lembaga adalah perangkat departementasi organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan/atau yang memerlukan penanganan khusus”. Sedangkan dalam ayat (6) b BAB dan Pasal tersebut disebutkan, Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama disingkat LP Maarif NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pendidikan dan pengajaran formal.

Dalam perjalanannya semua urusan pendidikan diserahkan kepada LP Ma'arif NU yang memang secara aktif berperan dalam proses-proses pengembangan pendidikan di Indonesia. Secara institusional, LP Ma'arif NU juga mendirikan satuan-satuan pendidikan mulai dari pra sekolah, tingkat dasar, menengah hingga perguruan tinggi; sekolah yang dalam struktur pemerintah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI maupun madrasah yang dalam struktur pemerintah di bawah Kementerian Agama (Kemenag) RI. Namun sejak Mukhtamar NU ke-32 tahun 2010 di Makassar LP Ma'arif NU hanya diserahi urusan pendidikan dasar dan menengah sesuai amanat AD/ART NU sebagaimana diuraikan di atas. Data yang ada di Pengurus LP Ma'arif NU Pusat saat ini ada 12.780 sekolah/madrasah yang bernaung di bawah LP Ma'arif NU yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yang terdiri dari SD/MI 7.092 satpen, SMP/MTs 3.929 satpen dan SMA/SMK/MA 1.759 satpen.

II. Awal Mula dan Founding Fathers

Keberadaan LP Ma'arif NU dimulai dari pertemuan KHA. Wahid Hasyim, KH. Mahfudz Shiddiq dan KH. Abdullah Ubaid, pada awal September 1929 di kantor Hoof Bestur Nahdlatul Ulama (HBNO) Jl. Bubutan Kawatan Surabaya, menjelang dilangsungkannya Mukhtamar NU ke-4 di Semarang. Pertemuan itu diadakan atas perintah Rais Akbar NU Hadratussysyaikh KHM. Hasyim Asy'ari, merespons permintaan KHA. Wahab Hasbullah yang mengusulkan agar ada badan khusus di tubuh HBNO yang mewadahi dan menangani bidang pendidikan. Selain itu, KHA. Wahab Hasbullah juga menyampaikan pemikiran agar inovasi dalam bidang pendidikan yang dirintis Wahid Hasyim di PP Tebuireng, diterapkan pesantren-pesantren lain, dengan demikian kemandirian dalam mendidik dan kualitas pendidikan meningkatkan. Sesuai dengan kelahiran NU untuk mempertahankan dan mengembangkan aswaja serta membentuk akhlak umat dan bangsa diharapkan terwujud melalui badan khusus tersebut. Karena itulah Hadratussysyaikh KHM. Hasyim Asy'ari meminta agar Wahid Hasyim menyampaikan pokok-pokok pikirannya kepada Mahfudz Shiddiq dan Abdullah Ubaid, dua aktifis dan motor penggerak NU saat itu.

1. *Wahid Hasyim*

Saat itu Wahid Hasyim belum aktif di NU, sedangkan Mahfudz Shiddiq dan Abdullah Ubaid sudah masuk dalam jajaran pengurus HBNO. Namun demikian Wahid Hasyim (lahir 1 Juni 1914), putra Rais Akbar NU Hadratussysyaikh KHM. Hasyim Asy'ari, yang saat itu baru berusia 15 tahun sudah merintis pendidikan yang memadukan pola pengajaran pesantren yang menitikberatkan pada ajaran

agama dengan pelajaran ilmu umum. Sistem klasikal diubah menjadi sistem tutorial. Selain pelajaran Bahasa Arab, murid juga diajari Bahasa Inggris dan Belanda yang dikuasai Wahid Hasyim secara otodidak. Pada tahun 1932 dalam usia 18 tahun menuntut ilmu ke Makkah, sekembali ke tanah air pada tahun 1935 “gebrakan” baru dalam dunia pendidikan pada masa itu lalu diwujudkannya menjadi Madrasah Nidzamiyah.

Perhatian Wahid Hasyim kepada pendidikan sangat besar. Pada tahun 1944 Wahid Hasyim mendirikan Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang pengelolaannya diserahkan kepada KHA. Kahar Muzakkir. Saat menjabat Menteri Agama pada tahun 1950 Wahid Hasyim mengeluarkan peraturan berdirinya Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAIN) yang menjadi cikal bakal IAIN dan UIN sekarang. Selain itu juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah tertanggal 20 Januari 1950, yang mewajibkan pendidikan dan pengajaran agama di lingkungan sekolah umum, baik negeri maupun swasta, mendirikan Sekolah Guru dan Hakim Agama di Malang, Banda-Aceh, Bandung, Bukittinggi, dan Yogyakarta.. serta mendirikan Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) di Tanjungpinang, Banda-Aceh, Padang, Jakarta, Banjarmasin, Tanjungkarang, Bandung, Pamekasan, dan Salatiga. Wahid Hasyim juga mengusulkan kepada Presiden Soekarno untuk mendirikan masjid Negara yang kemudian diberi nama Masjid Istiqlal. Pada 19 April 1953 dalam usia yang relatif muda, 39 tahun, KHA. Wahid Hasyim meninggal dunia dalam kecelakaan kendaraan bermotor di Cimindi Jawa Barat.

2. Abdullah Ubaid

Tokoh lain yang wafat seusia adalah Abdullah Ubaid. Seperti halnya Wahid Hasyim, tokoh yang lahir pada tahun 1899 ini termasuk sosok yang telah menunjukkan keistimewaannya sejak muda. Sosok ulama yang satu ini digolongkan sebagai salah seorang tokoh pemuda yang mendahului zamannya. Pendidikan formal pertama didapat dari Madrasah Al Chairiyah. Setamat dari madrasah tersebut, Abdullah Ubaid kembali ke Pasuruan dan kemudian pada usia 14 tahun dikirim ke Tebuireng, untuk meneruskan pendidikan pada Hadratussyaikh KH Hasyim Asy'ari. Sekembalinya dari Tebuireng, tahun 1919 dia diangkat menjadi guru di Madrasah Nahdlatul Wathan dan juga diminta mengajar di Madrasah Al Chairiyah, almamaternya, yang bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Arab. Abdullah Ubaid mampu memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan Nahdlatul Wathan, ketika ia berperan di dalamnya baik sebagai guru maupun sebagai penggerak yang dapat membuka cabang-cabang di beberapa kota di luar Surabaya.

Bersama Mahfudz Siddiq dan Thohir Bakri, Abdullah Ubaid tercatat sebagai pendiri Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor). Organisasi tersebut semula bernama Syubbanul Wathan yang didirikan pada tahun 1924. Kemudian pada tahun 1932 berubah menjadi BANO (Barisan Ansor Nahdlatul Oelama), yang kemudian menjadi ANO (Ansor Nahdlatul Oelama), dan seterusnya GP(Gerakan Pemuda) Ansor, hingga sekarang.

Peran utama Ansor pada saat itu, adalah mendidik dan membangkitkan semangat pemuda untuk bersama-sama dengan kekuatan bangsa lainnya serta mempersatukan kekuatan pemuda untuk memperjuangkan hak-haknya yang

terjajah di negerinya sendiri. Abdullah Ubaid juga dikenal sebagai tokoh pendidikan, sebagaimana ditulis Wahid Hasyim dalam artikel yang berjudul "Abdullah Ubaid Sebagai Pendidik" yang dimuat di majalah yang diterbitkan Lembaga Pendidikan Ma'arif "Suluh NU", Agustus 1941, Th. I No. 5. Pada 8 Agustus 1938. Abdullah Ubaid meninggal dunia karena sakit yang diderita sejak kecelakaan kendaraan bermotor yang dialaminya usai mengikuti Mukhtamar NU ke-13 pada Juni 1938 di Menes, Banten, Jawa Barat.

3. Mahfudz Shiddiq

Saat belajar di PP Tebuireng Abdullah Ubaid bertemu dan berteman akrab dengan Mahfudz Shiddiq dari Jember, seorang pemuda yang di kemudian hari dikenal sebagai penggerak NU lewat majalah dan organisasi kepemudaan. Di masa remajanya, Mahfudz Shiddiq adalah seorang aktivis dan organisatoris yang sangat piawai. Mahfudz Shiddiq yang pernah menjabat Ketua Tanfidziyah PBNU, Rais PBNU, adalah Perumus Konsep "Mabadi Khaira Umah", Perintis Gerakan Muawanah, Pemimpin Majalah "Berita Nahdlatul Ulama". Mahfudz Shiddiq juga menulis buku "Ijtihad dan Taqlid untuk Rekonsiliasi". Watak sebagai pendidik Mahfudz Shiddiq kentara sekali sepanjang masa hidupnya. Bermula dari menjadi pengasuh dan pengajar bagi adik-adiknya. Mahfud Shiddiq dikenal sebagai sosok yang sabar, tenang, dan sangat cerdas.. Mahfud Shiddiq juga suka berpenampilan necis dan rapi. Wawasan berfikirnya amat luas dan modern, baik dalam ilmu agama maupun pengetahuan umum. Sebagaimana dua sahabatnya itu Mahfudz Shiddiq, yang lahir pada tahun 1906 meninggal pada tahun 1944, dalam usia yang relative muda, yakni 38 tahun.

Pertemuan Wahid Hasyim, Mahfudz Shiddiq dan Abdullah Ubaid, pada awal September 1929 di kantor Hoof Bestur Nahdlatul Oelama (HBNO) Jl. Bubutan Kawatan Surabaya itu, membuahkan hasil perlunya dibentuk lembaga/bagian di HBNO yang khusus mengurus pendidikan, yang diberi nama Ma'arif. **Usulan pembentukan Ma'arif itu disahkan pada tanggal 19 September 1929 di Mukhtamar NU ke-4 yang dilaksanakan 17-20 September 1929 di Semarang.** HBNO Hasil Mukhtamar Semarang menunjuk Abdullah Ubaid sebagai Ketua yang membidangi Ma'arif (pendidikan).

III. Ma'arif Dalam Pusaran Sejarah

Ma'arif terus menjalankan tugas yang dibebankan NU untuk mencerdaskan bangsa, sesuai dengan dinamika perkembangan NU dan bangsa. Sejak tahun 1935 NU mulai merintis madrasah di luar pesantren, yang dilaksanakan secara klasikal. Sistem kelas yang disusun meliputi Madrasah Umum dan Madrasah *Ikhtishashiyah* (kejuruan). Madrasah Umum dengan 13 jenjang kelas dari tingkat *Awwaliyah* (2 tahun), *Ibtida'iyah* (3 tahun), *Tsanawiyah* (3 tahun), *Mu'allimin Wustha* (2 tahun) dan *Mu'allimin Ulya* (3 tahun). Sedangkan bidang kejuruannya meliputi bidang *Qudlat* (hukum), *Tijarah* (perdagangan), *Nijarah* (pertukangan), *Zira'ah* (pertanian), *Fuqara'* (sekolah khusus fakir miskin) dan Kejuruan khusus. Pada tahun 1937, NU memelopori pendirian al Majlis al Islami al A'la Indonesia (MIAI) dalam rangka mempersatukan langkah organisasi Islam di Indonesia. Tampil sebagai ketua Wahid Hasyim dengan Faqih Usman dari Muhammadiyah sebagai sekretarisnya.

Ketika penjajah Jepang masuk Indonesia pada Maret 1942 perkumpulan NU dan organisasi lainnya dibubarkan oleh pemerintah pendudukan Jepang. Para ulama melanjutkan gerakannya di MIAI dan kemudian mendirikan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Setelah Masyumi berdiri, MIAI dibubarkan. Melalui Masyumi

dan juga melalui pengaruh para kyai di Shumubu, NU senantiasa membela kepentingan umat Islam, masih dengan cara-cara akomodatif. September 1943 M, atas permintaan Wahid Hasyim lewat parlemen Jepang mengizinkan NU dan Muhammadiyah diaktifkan kembali dan bisa beraktivitas seperti di masa penjajahan Belanda. Namun demikian masa pendudukan Jepang yang sangat singkat, tahun 1942-1945, adalah masa yang sangat sulit bagi bangsa Indonesia, termasuk NU. Namun demikian, dengan segala kesulitan dan keterbatasannya saat itu Ma'arif tetap menjalankan tugasnya mencerdaskan anak bangsa.

Paska Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 NU menyelenggarakan Mukhtar NU ke-16 pada 26-29 Maret 1946 di Purwokerto. Ini adalah Mukhtar pertama setelah Mukhtar NU ke-15 yang diadakan pada tahun 1940. Sebelumnya, sejak berdiri pada tahun 1926 hingga 1940, NU menyelenggarakan Mukhtar setiap tahun sekali. Dalam Khutbah Iftitahnya pada pembukaan Mukhtar Purwokerto tersebut Rais Akbar Hadratussyaikh KHM. Hasyim Asy'ari menekankan pentingnya pendidikan setelah bangsa dan Negara Indonesia merdeka. "... kita harus memusatkan segala perhatian untuk mendidik orang-orang kita, dan melatih anak-anak kita hingga cakap bagi kehidupan di masa yang akan datang di dalam segala lapangannya, politik, militer, sipil, industri dan ekonomi serta yang lainnya. Itu semua harus kita jalankan dengan tenang, diam, dan tenteram", tegasnya.

Tanggal 25 Mei 1947 diselenggarakan Mukhtar NU ke-17 di kota Madiun. Dalam mukhtar ini atas prakarsa Wahid Hasyim didirikan "Biro Politik NU", dan disetujui oleh Mukhtar. Biro ini bertugas mengadakan perundingan-perundingan dengan kelompok intelektual yang mendominasi Masyumi, guna menyelesaikan berbagai ketimpangan yang dirasakan amat merugikan NU. Salah satu cara untuk itu, Wahid Hasyim yang disertai memimpin Ma'arif sepeninggal Mahfudz Shiddiq tahun 1944, mengusulkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas lembaga pendidikan di lingkungan NU.

Mengantisipasi akan dikeluarkannya Peraturan Presiden yang akan melarang organisasi/partai politik melakukan kegiatan dakwah dan sosial budaya pada tahun 1959 NU merubah Ma'arif menjadi Badan Otonom agar tetap bisa menjalankan kegiatannya. Seperti diketahui saat itu NU sudah menjadi partai politik. Dalam Mukhtar NU ke-19 tahun 1952 di Palembang diputuskan bahwa NU keluar dari Masyumi dan menjadi partai politik sendiri. Hal ini disebabkan oleh sikap eksekutif partai yang tidak lagi menganggap Majelis Syuro sebagai dewan tertinggi. Setelah keluar dari Masyumi dan menjadi partai politik yang berdiri sendiri itu, NU disibukkan dengan persiapan pemilihan umum pertama tahun 1955. Waktu yang dimiliki NU untuk bertarung dalam Pemilu 1955 relatif pendek jika dibandingkan dengan partai-partai besar lainnya. Namun demikian NU berhasil meraih 18,4 persen suara (45 kursi) di bawah Partai Nasional Indonesia (PNI) yang mendapatkan 22,3 persen suara (57 kursi) dan Masyumi yang memperoleh 20,9 suara (57 kursi).

Mukhtar NU ke-22 yang diselenggarakan 13 – 18 Desember 1959 di Jakarta dalam bidang organisasi menetapkan Ma'arif menjadi Badan Otonom. Keputusan bidang organisasi poin 5 selengkapannya (dalam ejaan lama); "5. Menetapkan definisi tentang: a. Bagian, yang dimaksud 'badan otonom' ialah departemen dari pada Partai yang bertugas memimpin, merentjanakan dan memikirkan kesempurnaan terlaksananya tujuan serta usaha Partai sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sesuai dengan ketentuan tersebut dalam kitab Anggaran Rumah Tangga Partai fasal (23), maka dalam melaksanakan tugasnya baik kedalam maupun keluar, haruslah mendapat pengetahuan dan persetujuan Pengurus Partai. b. Badan Otonom, yang

dimaksud “badan otonom” ialah suatu Organisasi Non-Politik yang bersifat vertical yang mempunyai Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga sendiri dan bersumber pada AD dan ART Partai bab VIII pasal (24). c. Badan Keluarga, yang dimaksud dengan ‘badan keluarga’ ialah suatu Organisasi Non-Politik yang mempunyai Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga sendiri yang bersifat vertical yang karena gerak dan langkahnya bersifat merealisasikan salah satu Pokok-Usaha Partai tersebut didalam AD Partai Pasal (4), maka berindukkan kepada salah satu Bagian atau Badan Otonom Partai. Sedangkan poin 8 menggariskan **“Bagian Ma’arif berhubung dengan tingkat perkembangan diwaktu sekarang dan masa yang akan datang dijadikan Badan Otonom seperti halnya Muslimat, Ansor, Pertanu, Sarbumusi dan lain-lainnya. Organisasi2 seperti IPNU, IPPNU, PERGUNU dan lain2 organisasi sebidang yang diperlukan menurut kebutuhan dan perkembangannya, merupakan Badan2 Keluarga yang berinduk organisasi kepada Ma’arif”**.

Sekitar dua minggu setelah keputusan menjadikan Ma’arif sebagai badan otonom itu keluar Penetapan Presiden (Penpres) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1959 Tentang Syarat-Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian tertanggal 31 Desember 1959. Meski dalam Penpres tersebut tidak ada satu pun pasal atau ayat yang melarang organisasi/partai politik melakukan kegiatan dakwah dan sosial budaya, termasuk pendidikan, namun pada kenyataannya berdasarkan Penpres tersebut organisasi/partai politik dibatasi kegiatannya di bidang dakwah dan sosial budaya, termasuk pendidikan.

VI. Anak Pinak

1. IPNU

Bukan tanpa alasan Muktamar NU ke-22 memasukkan IPNU, IPPNU dan PERGUNU sebagai Badan Keluarga Ma’arif, karena ketiga organisasi itu lahir dari rahim Ma’arif. IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama IPNU) adalah badan otonom Nahdlatul Ulama yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan NU pada segmen pelajar dan santri putra. Didirikan di Semarang pada tanggal 24 Februari 1954, saat berlangsungnya Konbes LP Ma’arif NU. Pendiri IPNU adalah M. Shufyan Cholil (mahasiswa UGM), H. Musthafa (Solo), dan Abdul Ghony Farida (Semarang). Ketua Umum Pertama IPNU adalah M. Tholhah Mansoer yang terpilih dalam Konferensi Segi Lima yang diselenggarakan di Solo pada 30 April-1 Mei 1954. Keputusan IPNU sebagai Badan Otonom NU ditetapkan dalam Muktamar NU ke-20 tahun 1954 di Surabaya yang menyatakan, bahwa IPNU adalah satu-satunya organisasi pelajar yang secara resmi bernaung di bawah NU dan hanya untuk laki-laki. Sedangkan pelajar putri akan diwadahi secara terpisah.

2. IPPNU

Berdasarkan keputusan muktamar itu beberapa aktifis pelajar putri menggagas perlunya dibentuk organisasi pelajar khusus untuk putri. Setelah mengadakan konsultasi dengan dua orang jajaran pengurus teras badan otonom NU yang disertai tanggung jawab dalam pembinaan organisasi pelajar yaitu, Ketua PB Ma’arif NU, KHM. Syukri Ghazali, dan Ketua PP Muslimat NU, Hj. Mahmudah Mawardi, yang juga sesekali hadir dalam pertemuan itu, keinginan agar untuk selanjutnya IPNU-Putri adalah badan yang terpisah dari IPNU mewujudkan. Pada tanggal 28 Februari-5 Maret 1955 para aktifis pelajar putrid NU mengadakan pertemuan di Malang dan menyepakati pembentukan organisasi IPNU-Putri yang secara organisatoris dan administratif terpisah dari IPNU. Deklarasi terbentuknya

IPNU-Putri, yang kemudian menjadi IPPNU, dilakukan pada tanggal 2 Maret 1955. Untuk menjalankan roda organisasi dan membentuk cabang-cabang ditetapkan susunan pengurus Dewan Harian (DH) IPPNU yang diketuai Umroh Machfudzoh Wahib.

3. PERGUNU

PERGUNU (Persatuan Guru Nahdlatul Ulama) lahir sesudah dua organisasi pelajar tersebut, meski sudah dirintis sejak sebelumnya, tepatnya tahun 1952. Organisasi ini dibentuk atas inisiatif para peserta Kongres Ma'arif se-Indonesia, yang antara lain memberikan mandat kepada Ma'arif Cabang Surabaya untuk menyiapkan pembentukannya. Pada tanggal 1 Mei 1958, Ma'arif Cabang Surabaya berhasil membentuk Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) Cabang Surabaya yang sekaligus sebagai kantor pusatnya. Kemudian, berdasarkan hasil Muktamar II PERGUNU, kedudukan kantor pusat dipindahkan ke Jakarta. Sejak lahir hingga akhir pemerintahan Orde Lama, roda organisasi PERGUNU berjalan baik.

Namun, selama masa Orde Baru, PERGUNU seolah-olah mati-suri, tidak menunjukkan aktivitas yang cukup berarti. Apalagi ketika pada Muktamar NU ke-27 tahun 1984 di Situbondo NU memutuskan kembali ke Khitah 1926 dan tidak berpolitik praktis, PERGUNU seperti terlepas dari NU. Dari Muktamar Situbondo hingga Muktamar NU ke-31 tahun 2005 di Solo Anggaran Rumah Tangga (ART) NU tak lagi memasukkan PERGUNU dalam daftar badan otonom NU. Barulah pada Muktamar NU ke-32 tahun 2010 di Makassar PERGUNU kembali dinyatakan sebagai salah satu badan otonom (banom) NU, dan kini tercantum dalam pasal 18 ayat (7) huruf f ART NU Hasil Muktamar NU ke-33 tahun 2015 di Jombang.

4. PMII

Ada lagi organisasi yang lahir sebagai anak pinak Ma'arif, yakni PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia). Gagasan pendirian organisasi mahasiswa NU muncul pada Muktamar II IPNU di Pekalongan (1-5 Januari 1957). Namun gagasan itu belum terwujud. Baru pada Muktamar III IPNU di Cirebon (27-31 Desember 1958) dibentuk Departemen Perguruan Tinggi IPNU yang diketuai oleh Isma'il Makki (Yogyakarta). Kemudian pada Konferensi Besar (KONBES) IPNU I di Kaliurang tanggal 14-17 Maret 1960 diputuskan perlunya mendirikan organisasi mahasiswa NU secara khusus di perguruan tinggi. Sebulan kemudian, tepatnya tanggal 14-16 April 1960 diadakan musyawarah mahasiswa NU yang bertempat di Sekolah Mu'amalat NU Wonokromo, Surabaya. Peserta musyawarah adalah perwakilan mahasiswa NU dari Jakarta, Bandung, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar, serta perwakilan Senat Perguruan Tinggi yang bernaung di bawah NU. Dari musyawarah tersebut pada tanggal 17 April 1960 dideklarasikan organisasi mahasiswa yang bernama PMII.

PMII sepenuhnya berada di bawah naungan NU. PMII terikat dengan segala garis kebijaksanaan partai induknya, NU. PMII merupakan perpanjangan tangan NU, baik secara struktural maupun fungsional. Namun pemerintahan Orde Baru pelan tapi pasti mengkerdikan fungsi partai politik, sekaligus juga penyederhanaan partai politik secara kuantitas, dan issue back to campus serta organisasi-organisasi profesi kepemudaan mulai diperkenalkan melalui kebijakan NKK/BKK. Karenanya PMII melalui Mubes ke-III di Murnajati 14 Juli 1972, PMII mencanangkan independensi, terlepas dari organisasi manapun (terkenal dengan

Deklarasi Murnajati). Kemudian pada kongres tahun 1973 di Ciloto, Jawa Barat, diwujudkanlah Manifest Independensi PMII. Karena PMII sudah menyatakan independen, tak terikat lagi dengan NU maka keberadaannya sebagai badan otonom NU pun dihilangkan di ART NU. Baru pada Mukhtamar NU ke-33 tahun 2015 di Jombang PMII kembali masuk dalam daftar badan otonom NU, sebagaimana tercantum dalam ART NU Pasal 18 ayat (6) d.

V. Nakhoda Ma'arif

1. KH. Abdullah Ubaid (1929-1938);
2. KH. Mahfudz Shiddiq (1938-1940);
3. KHA. Wahid Hasyim (1940-1946);
4. KH. Fathurrahman (1946 - 1949);
5. KH. Anwar Musaddad (1949 – 1951);
6. H. Moh. Anzor Suryohadibroto (1951 – 1954);
7. KHM. Syukri Ghazali (1954-1959);
8. HA. Aziz Djar (1959-1977), sesuai Akte Notaris RM. Soeroto No 83/1972;
9. KHA. Zaini Miftach (1977-1981);
10. HA. Aziz Djar (1981-1985), sebelumnya Wakil Ketua pada masa KHA. Zaini Miftach;
11. Drs. Musa Abdillah (1985-1989), sebelumnya Wakil Ketua pada masa HA. Aziz Djar;
12. Prof. Dr. H. Achmad Sanusi SH, MPA (1990-1994);
13. HA. Ghafar Rahman, SH (1994-1999), sebelumnya Sekjen PBNU;
14. Drs. HM. Nadjid Muchtar, MA (2000-2007), sebelumnya Wakil Ketua pada masa Drs. Musa Abdillah dan Prof. Dr. H. Achmad Sanusi SH, MPA, Sekretaris pada masa KHA. Zaini Miftach dan HA. Aziz Djar;
15. Dr. HM. Thoyib IM (2007-2010), sebelumnya Wakil Ketua pada masa Drs. HM. Nadjid Muchtar, MA (2005-2007);
16. Prof. Dr. H. Manshur Ramly (2010-2013);
17. Z. Arifin Junaidi (2013 – sekarang)

VI. Penutup

Dari uraian di atas maka dapat dikemukakan dua hal. Pertama, kelahiran LP Ma'arif NU adalah untuk:

1. Mewadahi lembaga pendidikan di lingkungan NU;
2. Melakukan pembaharuan di bidang pendidikan;
3. Meningkatkan kemandirian;
4. Meningkatkan kualitas pendidikan;
5. Mempertahankan dan mengembangkan aswaja;
6. Membentuk karakter bangsa.

Mengenai tanggal kelahiran dapat disimpulkan bahwa keberadaan Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif NU mulai adanya keputusan Mukhtamar NU ke IV di Semarang yang digelar pada 12-15 Rabiuts Tsani 1348 H/17-20 September 1929. Keputusan disetujui adanya badan khusus LP Ma'arif NU tepatnya diambil pada tanggal 19 September 1929, sehari sebelum penutupan Mukhtamar, sehingga tanggal tersebut bisa ditetapkan sebagai Hari Lahir LP Ma'arif NU.

Jakarta, 23 November 2016

b). Catatan sejarah Lahirnya LP MA'ARIF NU

**CATATAN SEJARAH LAHIRNYA
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA
oleh
Wahyudin Ghozali**

A. Embrio Lahirnya Ma'arif

Sebagaimana kita ketahui melalui catatan sejarah yang digali dari berbagai sumber, kelahiran Lembaga Pendidikan Ma'arif identik dengan Nahdlatul Ulama (NU). NU lahir dari embrio Nahdlatul Watan, sebuah organisasi penyelenggara pendidikan yang lahir sebagai produk pemikiran yang dilahirkan oleh forum diskusi yang di selenggarakan secara rutin oleh "Tashwirul Afkar", dipimpin oleh KH. Wahab Hasbullah bersama dengan K.H. M. Mansur (sebelum beliau masuk ke Muhammadiyah, pada tahun 1922). Dalam rectperson tahun 1916, tertulis tujuan Nahdlatul Wathan adalah untuk memperluas dan mempertinggi mutu pendidikan madrasah-madrasah yang teratur.

Dalam perjalanan sejarah Ma'arif telah berkiprah untuk memajukan pendidikan di Indonesia, melalui dari peningkatan Madrasah Putri (Banat) sampai dengan usulan penghapusan Guru Ordonantie (tahun 1925) yang dibuat Pemerintah Hindia Belanda karena banyak merugikan guru-guru madrasah.

Bila demikian maka, Gerakan pendidikan Ma'arif sebenarnya sudah dimulai sebelum NU, organisasi NU secara resmi didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya oleh KH. Hasyim Asy'ari bersama ulama-ulama lain yang berfaham Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang biasa disingkat Aswaja.

Setelah resmi NU berdiri, kemudian disusul banyaknya madrasah yang berdiri disamping pondok pesantren. Maka pada Muktamar NU ke II tahun 1927 muncul ide yang membicarakan masalah perbaikan metodologi pengajaran. Selanjutnya pada Muktamar ke III tahun 1928 di Surabaya di bicarakan peningkatan dan perluasan Madrasah. Serta di akhiri dengan anjagsana ke lembaga pendidikan di Jombang seperti Tambak beras, Denanyar dan Nganjuk.

Latar belakang LP Ma'arif NU didirikan. Jika disederhanakan, latar belakang tersebut menjadi dua kondisi, yaitu:

a. Kondisi Makro

Kondisi ini meliputi:

- 1). Respon terhadap lembaga pendidikan para Modernis, seperti Muhammadiyah, Persis, al-Irsyad dan lain-lain.
- 2). Respon terhadap lembaga pendidikan para missionaris Kresten (missi zending), seperti Katolik dan Protestan.
- 3). Respon terhadap lembaga pendidikan milik pemerintah kolonial Belanda yang sekuler.

b. Kondisi Mikro

Kondisi ini meliputi:

- 1). Menata lembaga pendidikan milik NU agar terorganisir dan terkoordinasi dengan baik, efektif dan efisien.
- 2). Mengembangkan ilmu pengetahuan di lingkungan NU secara integral agar selaras dengan perkembangan IPTEK.
- 3). Mementingkan paham Aswaja pada generasi muda Muslim Indonesia.

B. Masa Kelahiran

Perkembangan pendidikan Ma'arif di kalangan NU sangat pesat, sehingga dirasakan perlunya sebuah lembaga untuk mengorganisasi kegiatan kependidikan tersebut. Untuk itu pada Mukhtamar NU ke IV di Semarang, tanggal 19 September 1929 di bentuklah Ma'arif dengan bentuk H.O.B. (Hoofdbestuur Nahdlatul Oelama) Bagian Perguruan (Ma'arif) dan terpilih sebagai presiden yaitu Abdullah Ubaid dari Surabaya.

Mukhtamar NU keempat tersebut, digelar pada 12-15 Rabi'ul Tsani 1348 H/17-20 September 1929 M di Hotel Arabistan Kampung Melayu Semarang. Mukhtamar di Semarang tergolong sukses karena dihadiri 1.450 peserta terdiri dari 350 Kyai, 900 pengawal Kyai dan 200 pengurus Tanfidziyah. Saat Mukhtamar keempat di Semarang sudah terdaftar: 63 Cabang (13 Jawa Barat, 27 Jawa Tengah dan 23 Cabang Surabaya dan Madura). Penutupan Mukhtamar Semarang juga sangat meriah karena digelar di Alun-Alun Semarang dengan dihadiri 10.000 jama'ah. Mukhtamar Semarang dihadiri langsung oleh Rais Akbar KH M Hasyim Asy'ari dinilai sebagai tonggak awal pengenalan NU daerah-daerah di luar Surabaya (Choirul Anam: 2015).

Sekitar tahun 1938 (1536 H), Lembaga Pendidikan Ma'arif berhasil melahirkan keputusan tentang susunan madrasah-madrasah NU yang harus mulai dijalankan pada tanggal 2 Muharram 1537 H.:

1. Madrasah Awaliyah dengan lama belajar 2 tahun.
2. Madrasah Ibtidaiyah dengan lama belajar 3 tahun.
3. Madrasah Tsanawiyah dengan lama belajar 3 tahun
4. Madrasah Mu'allimin Wustha 2 tahun.
5. Madrasah Mu'allimin 'Ulya 3 tahun.

Selanjutnya pada tahun 1939 sebagai presiden Ma'arif di pegang oleh KH. A. Wahid Hasyim. Dengan adanya Lembaga Pendidikan Ma'arif maka pendidikan yang dikelola NU semakin teratur.

Sebagaimana ditulis Ahmad Muhli Junaidi dalam artikelnya mengisahkan sebagai berikut. Di Menes, Banten pada tanggal 11-16 Juni 1938, 12 tahun setelah NU didirikan di Surabaya, berlangsunglah perhelatan akbar NU berupa Mu'tamar ke- 13 (Ensiklopedi Islam III, 2001: 354). Hal penting dari mu'tamar itu adalah didirikannya divisi khusus yang mengurus masalah pendidikan dan diberi nama lembaga pendidikan Ma'arif (LP Ma'arif) NU, dengan ketuanya K.H. Abdul Wahid Hasyim (w 1953) (Thoha, 1994: 29).

Setelah kemerdekaan Indonesia dan NU menjadi partai politik, maka pada Muktamar NU ke-XXI di Jakarta tanggal 1 Desember tahun 1959, memutuskan bahwa Ma'arif sebagai badan otonom dengan nama Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama, dengan ketua umum Abdul Aziz Diyar. Ketentuan Ma'arif sebagai badan otonom tertera pada Pasal 13 AD/ART NU hasil Muktamar XXI.

C. Masa Pancaroba

Signifikansi LP Ma'arif NU didirikan merupakan cita-cita para Ulama NU yang melihat kondisi umat Islam selama dibawah penjajahan Belanda sangat terpuruk. Utamanya kondisi dalam pendidikan, umat Islam pada masa LP Ma'arif didirikan, atau kebelakang dari masa itu, dalam keadaan amat tertinggal dari lembaga pendidikan yang dikelola oleh Belanda, ataupun yang dikelola oleh organisasi-organisasi keagamaan lainnya.

LP Ma'arif didirikan merupakan wujud amanah dari Anggaran Dasar (AD) NU. Sebagaimana berbunyi: "dibidang pendidikan dan pengajaran, mengusahakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran ... untuk membina manusia Muslim yang bertakwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, berkepribadian serta berguna bagi Agama, Bangsa dan Negara" (Bruinessen, 1999: 310).

AD di atas diputuskan dalam mu'tamar ke-13, kemudian diperbarui dalam mu'tamar ke-27 tahun 1984 di Situbondo (Ensiklopedi Islam III, 2001: 356).

Dimasukkannya K.H. Abdul Wahid Hasyim sebagai ketua divisi LP Ma'arif NU memang sangat tepat. Beliau adalah alumni ponpes Tebuireng yang didirikan oleh ayahnya, Hasyim Asy'ari (w 1947), di mana sejak 1935 ponpes tersebut telah memasukkan ilmu-ilmu umum sebagai kurikulum wajib di pondok tersebut. Ini semakin nyata, sebagaimana penulis gambarkan, bahwa LP Ma'arif hadir ingin memberikan solusi bagaimana umat Islam yang berbasis tradisionalis ini, –karena K.H. Abdul Wahid Hashim telah juga memberikan kebijakan pada LP Ma'arif sebagaimana yang ia tempuh dalam membina ponpes Tebuireng di Jombang sebelum menjadi ketua LP Ma'arif, tujuannya adalah– agar mempunyai bekal dalam mengarungi kehidupan dunia kelak yang ternyata itu sangat membutuhkan penguasaan akan ilmu-ilmu keduniaan. Demikian di atas tentu berangkat dari ajaran Islam sebagaimana disabdakan Nabi SAW:

“Bekerjalah untuk kehidupan duniamu seakan-akan kamu hidup abadi, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok” (H.R. Abu Daud, Tirmidhi, Ahmad dan Ibnu Majah).

Juga dalam sabda Nabi SAW yang lain: Kalian lebih mengetahui urusan-urusan keduniaan kalian (H.R. Abu Daud) (Junaidi, 2003:41)

Demikian itu sangat mempengaruhi pertumbuhan LP Ma'arif NU ke depan. Maka sangat masuk akal jika kemudian desain kurikulum LP Ma'arif, disamping memantapkan epistemology paha Aswaja yamh tetap dengan ketat berpatokan pada madzhab yang empat, juga kemudian memasukkan ilmu-ilmu, sebagaimana pendapat al-Ghazali yang dikutip oleh Syed al-Atas (dalam Daud, 2003: 282)

disebut dengan ilmu fardhu kifayah, tak ayal lagi, NU melalui LP Ma'arif menampung ilmu-ilmu umum itu ke dalam kurikulumnya.

LP Ma'arif mencapai puncak ketenarannya waktu Subcha ZE (w 1972) memimpin (Bruinessen, 1999: 78). Subchan sebagai pemuda yang mencuat lewat aksi-aksi anti Komunis di era 1960-an, berhasil menjadi tokoh nasional pada usia 32 tahun (Aula. Juni 1991: 59-60). Ia membentuk komando aksi penggayangan Gestapu (KAP-Gestapu) (Bruinessen, 1999: 86). Dalam masanya LP Ma'arif merasa diuntungkan karena posisi Subchan yang dekat dengan berbagai kalangan di puncak pemerintahan waktu itu. Ia dekat dengan kalangan meliter, utamanya petingginya, A.H Nasution. Sikapnya yang luwes, gaya bicarannya yang mempesona dan kekuatan argumentasinya yang jitu, Subchan telah membawa LP Ma'arif menjadi lebih dikenal di luar NU. Ia mendekatkan para fungsionaris LP Ma'arif pada realitas dan kondisi sosial yang berkembang saat itu. Rupanya ia berhasil mengatur kurikulum di lingkungan LP Ma'arif lebih integritas, yang lebih sesuai dengan hakikat ilmu dalam Islam (Daud, 2003: 163-188).

Cukup disayangkan, akibat konflik NU dengan rezim Soeharto di era 1970-an, akhirnya kondisi departemen Agama yang sejak masa kemerdekaan dipegang oleh Ulama NU, lepas dari genggamannya, yang pada masa terakhir itu dipimpin oleh K.H. Syaifuddin Zuhri (Bruinessen, 1999:80). Lepasnya departemen ini dari genggamannya NU berimplikasi amat besar kepada institusi NU dan juga LP Ma'arif itu sendiri. Maka bulan madu antara NU, sebagai atasan LP Ma'arif, dengan pemerintah cq. Departemen Agama, akhirnya buyar sama sekali. Kebijakan pemerintah yang berpihak pada NU sebelum departemen ini jatuh pada kaum Muslim modernis, akhirnya putus. Nuansa ke-NU-an yang sangat kental pada era orde lama yang diterapkan pada madrasah atau sekolah yang dikelola oleh departemen Agama dan madrasah-madrasah swasta, oleh Ahmad Mukti Ali, pengganti K.H. Syaifuddin Zuhri, dihilangkan sama sekali. NU dan LP Ma'arifnya termarginalkan. Lembaga-lembaga pendidikan dibawah NU memperoleh perlakuan diskriminatif. Kesan ini sepertinya terus menerus berlangsung sepanjang rezim orde baru berkuasa (Feillard, 1999:304). Baru kemudian kesan itu hilang setelah reformasi bergulir.

Akibat dari perlakuan dari diskriminatif ini sekolah-sekolah menyembunyikan keterkaitan mereka dengan NU. Saat itu, tidak lagi terdengar istilah madrasah ibtida'iyah NU (MINU), sekolah dasar NU (SDNU), madrasah tsanawiyah NU (MTSNU), sekolah menengah NU (SMPNU/SMANU). Mereka menggunakan nama-nama yang kurang mencolok, seperti sekolah "Wahid Hasyim", nama mantan menteri Agama. Dengan alasan yang sama, pada tahun 1972, Universitas NU di Malang diberi nama Universitas Sunan Giri, nama salah seorang walisanga (Feillard, 1999:304).

Pengelolaan yang tidak baik dan pemusatan konsentrasi pada aktifitas politik juga menjadi penyebab lambannya sistem pendidikan NU. LP Ma'arif sebagai divisi pendidikan NU sejak awal tahun 1970-an sudah mengkhawatirkan penyusutan anggotanya. Pada masa itu, 30% sekolah telah menarik diri dari LP Ma'arif.

Pada tahun 1984, dalam upayanya untuk mendapatkan kembali sekolah yang hilang atau bersembunyi dibalik nama pinjaman, LP Ma'arif mengeluarkan

peraturan baru yang meminta sekolah-sekolah yang seialiran dengan NU agar dengan jelas menyatakan identitas dan kembali mendaftarkan diri ke LP Ma'arif. Permintaan ini hingga tahun 1987, tidak begitu membuahkan hasil, dan ini membawa akibat yang sangat buruk bagi usaha mendapatkan dana yang diperlukan untuk mengurus sekolah-sekolah NU. Namun pada tahun 1991, beberapa pengurus pendidikan di daerah melihat madrasah-madrasah mulai mendaftarkan diri ke LP Ma'arif dan nama NU mulai muncul kembali dipapan nama yang dipasang didepan sekolah masing-masing (Feillard, 1999:305). Pada era itu pula, sekolah-sekolah dibawah NU kembali dilirik masyarakat muslim dan siswa yang masukpun mengalami kenaikan cukup baik. Demikian pula perguruan tinggi dibawah NU bertambah banyak dibangun. Di Malang ada Unisma, di Bandung ada Unisba, di Jember UIJ, dan di Madura ada UIM. Semua ini menandakan perkembangan yang semakin baik dalam LP Ma'arif.

Muktamar NU ke-30 di Lirboyo Kediri pada tahun 1999 merupakan momentum yang tepat bagi kalangan Nahdliyin untuk memantapkan kembali pemahaman yang amat mendasar tentang pendidikan sekaligus bagaimana langkah-langkah yang harus dicapai dalam upaya pembenahannya.

Dari periode ke periode, Lembaga Pendidikan Ma'arif NU secara aktif melibatkan diri dalam proses-proses peningkatan pendidikan di Indonesia. Semangat yang di dasari tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa maka Lembaga Pendidikan Ma'arif NU telah berkembang dan mampu mendirikan lembaga-Lembaga Pendidikan yang bernaung di bawah Lembaga Pendidikan Ma'arif NU yang meliputi TK/TPA, SD, SLTP, SMU/SMK, MI, MTs, MA, dan perguruan tinggi.

Namun demikian, berdasarkan hasil keputusan Muktamar NU saat ini LP Ma'arif NU berstatus sebagai perangkat departementasi NU yang mengelola pendidikan formal dasar dan menengah, yakni mulai dari SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pada catatan sejarah yang tertulis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa secara resmi didirikannya Lembaga Pendidikan Ma'arif NU diputuskan pada pelaksanaan Muktamar NU ke IV di Semarang yang digelar pada 12-15 Rabiuts Tsani 1348 H/17-20 September 1929.

Sedangkan pada tanggal 19 September 1929 di bentuklah Ma'arif dengan bentuk H.O.B. (Hoofdbestuur Nahdlatul Oelama).

Dengan demikian tanggal 19 September tersebut diatas, dapat ditetapkan sebagai Hari Lahir (Harlah) LP Ma'arif NU.

Demikian sekilas catatan sejarah LP Ma'arif NU yang dapat disusun dan disampaikan.

Jakarta, 7 Desember 2016